

# JURNAL AKMAMI

---

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 2 2024 hal 178-187

### **PENGARUH AUDIT INTERNAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BINJAI**

Oleh:

Helda Ginting

Universitas Sumatera Utara

Email : [heldaginting@gmail.com](mailto:heldaginting@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh audit internal, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Binjai. Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survei analitik. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan auditor di Pemerintahan Kota Binjai terdiri dari 33 PPK dan 19 auditor sehingga populasi berjumlah 52 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial audit internal, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai.*

**Kata Kunci** : audit internal, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kinerja keuangan

#### **PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah mengamanatkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mengendalikan seluruh kegiatan dengan menyelenggarakan sistem pengendalian intern. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, telah disempurnakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengubah akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat ke pertanggung jawaban kepada masyarakat melalui DPRD. Undang-undang tersebut memberi ketegasan bahwa pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang secara langsung mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan secara efektif harus dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, memelihara dan

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 2 2024 hal 178-187

meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memberikan peringatan dini terhadap kesalahan penyajian dan pelaporan keuangan. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana otonomi dan pengelola keuangan, wajib menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan APBN/ APBD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003) kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan keuangan dari tiap SKPD yang mencerminkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Adapun opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Binjai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, sebagai berikut

**Tabel 1.1 Opini BPK terhadap LKPD Kota Binjai**

No.	Tahun Anggaran	Opini
1	2011	Wajar Dengan Pengecualian
2	2012	Wajar Dengan Pengecualian
3	2013	Wajar Dengan Pengecualian
4	2014	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas
5	2015	Wajar Dengan Pengecualian

Sumber : LHP BPK RI

Dari Tabel diatas dapat dilihat penurunan opini terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Binjai kepada BPK RI pada tahun 2015 yaitu dari Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP) untuk pemeriksaan LKPD Kota Binjai Tahun Anggaran 2014 dan pada tahun berikutnya untuk pemeriksaan LKPD Kota Binjai Tahun Anggaran 2015 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk Tahun Pemeriksaan 2015, BPK mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Binjai untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Setiap tahun sebelum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI, Inspektorat sebagai APIP dan SPIP di Pemerintah Daerah telah mereview Laporan Keuangan tersebut agar kesalahan penyajian dan pencatatan dapat di minimalisir untuk menghasilkan opini yang baik sebagai bukti kinerja keuangan yang baik. Sebagai bagian dari studi pendahuluan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai, maka perlu dilakukan pengukuran value for money atau sering disebut dengan pengukuran 3E, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Achmadi et al,2005; Mahsun2006). Pengukuran ini menegaskan tolok ukur keberhasilan pengelolaan tidak hanya diukur dari tingkat capaian penyerapan dana, tetapi juga ditentukan dari target kinerja yang terukur (Achmadi et al, 2005). Data APBD Kota Binjai yang diperoleh diolah dengan 3 formula (Mahsun, 2006)

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Kinerja Keuangan

Kewirausahaan adalah hasil karya seseorang yang berpotensi menghasilkan Pengertian kinerja oleh Bastian (2006) adalah gambaran capaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi dalam periode tertentu dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu, sedangkan menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 2 2024 hal 178-187

Menurut Sucipto (2003) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut IAI (2007) Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya..

Kuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan keuangan daerah pada masa otonomi adalah menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah, pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, dan standar akuntansi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara kreatif melalui penggalan potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai keuangan daerah adalah kemandirian keuangan daerah melalui upaya yang terencana, sistematis dan berkelanjutan, efektif dan efisien. Menurut Sucipto (2005) kinerja keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai berikut: “Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang- undangan selama satu periode anggaran”. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari satu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Kurniawan,2011). Mardiasmo (2002) mendefinisikan “sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan non financial”. Adapun Indikator kinerja seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) bahwa sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2008). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2008).

### Audit Internal

Tujuan utama internal audit adalah membantu satuan kerja operasional mengelola risiko dengan mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan yang memberi nilai tambah untuk memperkuat organisasi. Selanjutnya tugas internal auditing adalah menyampaikan kepada pihak manajemen berbagai temuan, kondisi, analisa, penilaian, kesimpulan dan rekomendasi mengenai kegiatan yang diperiksa dan konsultasi yang dilakukannya. Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 2 2024 hal 178-187

Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.

2. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.

3. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.

4. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.

5. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Fungsi audit internal adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan, kemudian memberikan saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan mengambil keputusan atau tindak lanjutnya. Menurut Tampubolon (2005) fungsi audit internal adalah fungsi audit intern adalah lebih berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang. Komite audit berperan dalam mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan dalam perusahaan. Perannya adalah mendeteksi adanya beberapa kekeliruan dalam proses pelaporan keuangan dan memonitor hubungan antara manajemen perusahaan dan auditor (Lawrence,2003). Sekilas dari fungsi komite audit dan audit internal perannya hamper sama, namun auditor internal bertanggungjawab untuk mengevaluasi operasional perusahaan agar berjalan secara efisien dan efektif dan mempertanggungjawabkannya kepada manajemen, sedangkan komite audit mengevaluasi kinerja manajemen dan mempertanggungjawabkan kepada dewan direksi dan pemegang saham

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan." Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian : pimpinan instansi pemerintah dan pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

2. Penilaian risiko : pimpinan instansi pemerintah harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah, baik dari dalam maupun dari luar.

Kegiatan pengendalian : tindakan untuk mengatasi risiko serta penetapan kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan pengendalian yang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan instansi.

3. Informasi dan komunikasi : informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi dan pihak lain yang ditentukan, disajikan dalam suatu bentuk dan sarana

# JURNAL AKMAMI

---

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 2 2024 hal 178-187

tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

4. Pemantauan pengendalian intern : pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja SPIP dari waktu ke waktu dan memastikan rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yang bersifat kausal (Causal Research). Penelitian kausal bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi) (Sugiyono, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh APIP dan karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan dengan SPIP sebagai variabel moderating Pada Pemerintah Kota Binjai. Berdasarkan metodenya maka penelitian ini termasuk penelitian survey yaitu penelitian yang dilakukan dalam populasi besar maupun kecil sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis (Kerlinger dalam Daulay, 2010) Lokasi penelitian ini berada di lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang dimulai tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor di Inspektorat Kota Binjai dan PPK SKPD sebanyak 50 orang. Sampel penelitian adalah seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Menurut Sugiyono (2013), bila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, yakni sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Selanjutnya bila dilihat dari teknik pengumpulan datanya maka dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuisisioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisisioner.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis, baik secara simultan maupun parsial seberapa besar pengaruh APIP, Karakteristik Pemerintah Daerah dan SPIP terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Binjai. Pengolahan data menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS)

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilaksanakan di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang berjumlah 33 SKPD. Pada penelitian ini pengumpulan data telah dilakukan melalui beberapa tahap, yakni dengan menyebarkan kuisisioner kepada 52 responden yang terdiri dari 33 PPK SKPD dan 19 orang auditor pada Inspektorat kota yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Berdasarkan pada batas waktu yang telah ditentukan, kuisisioner dikutip kembali. Tingkat pengembalian kuisisioner dalam penelitian ini mencapai 100%, artinya seluruh kuisisioner yang disebar kepada 33 PPK SKPD dan 19 Auditor pada inspektorat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Binjai seluruhnya kembali

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 2 2024 hal 178-187

Uji t (Uji Parsial)

Koefisien Jalur Regresi Sub-struktur (Uji t)

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.749	.334		2.241	.030
Audit Internal (X1)	.197	.056	.353	3.508	.001
1 SPIP (X2)	.298	.075	.397	3.977	.000
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (X3)	.297	.052	.501	5.727	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah (Y)

Sumber: hasil penelitian (2017) diolah

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, maka secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen diuraikan sebagai berikut :

1. Variabel audit internal ( $X_1$ ) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  dan  $t$ -hitung (3,508) <  $t$ -tabel (1,664), dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Binjai.
2. Variabel SPIP ( $X_2$ ) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  dan  $t$ -hitung (3,977) >  $t$ -tabel (1,664), dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Binjai.
3. Variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan ( $X_3$ ) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  dan  $t$ -hitung (5,727) >  $t$ -tabel (1,664), dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Binjai.

### Pengaruh Audit Internal terhadap Kinerja Keuangan di Pemerintah Kota Binjai

Pengujian pengaruh variabel audit internal terhadap kinerja keuangan menggunakan uji t dan diperoleh hasil tingkat signifikansi variabel audit internal sebesar 0.001 yang lebih kecil dari  $\alpha=0.05$  menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel audit internal terhadap variabel kinerja berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riswanto (2013) yang menyatakan bahwa audit internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah Purwakarta. Selanjutnya penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman (2014) yang menyimpulkan bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Listiani (2012) yang menunjukkan audit internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Teori yang mendukung adanya pengaruh audit internal dengan kinerja keuangan adalah menurut Husein Umar, yang menyatakan bahwa untuk membuat informasi keuangan data yang dibutuhkan antara lain dari hal-hal yang berhubungan dengan kinerja keuangan dari data yang diperoleh dari hasil proses audit internal dan hasil intelijen keuangan. Audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat daerah selalu menjalankan pemeriksaan berkala setiap enam bulan sekali, pemeriksaan terpadu atas data keuangan seperti Buku Kas Umum (BKU), laporan asset dan serta laporan keuangan pada setiap SKPD, pemeriksaan yang dilakukan pada SKPD

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 2 2024 hal 178-187

merupakan tindak lanjut dari pengusutan atas penyimpangan yang terjadi pada pengelolaan keuangan daerah, penilaian atas kinerja yang telah dilakukan berdasarkan kegiatan dan program yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, monitoring (Pengawasan) oleh Inspektorat terhadap program dan kegiatan SKPD bertujuan untuk meningkatkan kinerja SKPD semakin baik dan melakukan evaluasi (penilaian) oleh Inspektorat memberikan penjelasan atas kelemahan dan kekurangan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan SKPD. Audit internal secara rutin dan optimal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Binjai dapat meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPIP) terhadap Kinerja Keuangan di Pemerintah Kota Binjai**

Secara parsial sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan di Pemerintah Kota Binjai. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha=0,05$ . Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sariah (2010) yang menyatakan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Yulindo (2012) yang menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Demikian juga halnya dengan penelitian Ibrahim (2017) yang menunjukkan bahwa unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pengendalian risiko) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan tabulasi jawaban dari responden untuk variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi pimpinan instansi pemerintah mengambil tindakan tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur atau aturan perilaku, dalam waktu yang ditentukan pimpinan SKPD melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi, fisik kas dan barang, pimpinan melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap sistem akuntansi, Pimpinan memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi, transaksi yang diinput dan diproses ke dalam komputer adalah seluruh transaksi yang telah diotorisasi, Pegawai dan atasan memahami tujuan dari pengendalian, informasi disediakan tepat waktu, memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat, SKPD selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan dan saran yang diberikan oleh BPK/ Inspektorat, mayoritas responden menjawab setuju. Hal ini sejalan dengan peningkatan level SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Binjai ke level 3 untuk terwujudnya kinerja keuangan yang lebih baik.

### **Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Keuangan di Pemerintah Kota Binjai**

Pengujian pengaruh variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah menggunakan uji t menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha=0,05$ . Artinya hubungan antara variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2016) yang menyimpulkan tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan persepsi responden yang mayoritas menjawab setuju untuk pertanyaan SKPD harus menindaklanjuti temuan kurang dari 30 hari. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 20 ayat (1) menyebutkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Diana (2013) rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 2 2024 hal 178-187

penyelamatan uang/asset ke kas negara / daerah/ perusahaan dan/atau tindakan administratif. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/ daerah serta terciptanya perbaikan/ peningkatan kualitas atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan dari proses pemeriksaan sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja keuangan.

### **Pengaruh Audit Internal, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaruh secara simultan dapat dilihat dari hasil uji F, dimana nilai F hitung dari variabel independen (audit internal, SPIP dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan) secara serentak lebih besar dari nilai F tabel pada tingkat signifikansi di bawah 0,05 sehingga dapat diambil keputusan H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa audit internal, SPIP dan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di pemerintah Kota Binjai.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Audit internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Binjai. Pengaruh positif ini berarti, jika audit internal, SPIP dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kota Binjai. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Binjai. Pengaruh positif ini berarti, jika audit internal, SPIP dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kota Binjai. Tindak lanjut hasil pemeriksaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Binjai. Pengaruh Positif ini berarti, jika audit internal, SPIP dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kota Binjai. Audit internal, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Binjai..

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aikins. 2010. "An Examination Of Government Internal Audits Role In Improving Financial Performance", Publik Finance and Management, Vol.11, No.4.
- Amony, 2016. "Internal Control System and Financial Performance in Non Governmental Organisation in Uganda : A Case Study of International Union for Conservation of Nature", International Journal of Contemporary Applied Sciences.ISSN:2308-1365, Vol.3, No.2
- Bastian, Indra 2006. Audit Sektor Publik. Edisi ke 2 Jakarta: Salemba Empat. Cohen. 2008. "Identifying the Moderator Factors Of Financial Performance in Greek Municipalities", Financial Accountability&Management, Vol.4, No.3.
- Erlina dan Mulyani, Sri. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, USU Press, Medan.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 2 2024 hal 178-187

21 Update PLS Regresi, Edisi Ketujuh, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ibrahim. 2017. "The Impact of Internal Control Systems On Financial Performance : The case of Health Institutions in Upper West Region of Ghana", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. ISBN: 2222- 6990, Vol.7, No.4

Indriasari, Desi. 2008. "Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)", *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kamau. 2014. "Effect Of Internal Controls on The Financial Performance Of Manufacturing Firms In Kenya". University Of Nairobi.

Kusumaningrum. 2015. " Pengaruh Karakteristik Inspektorat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah". Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Lubis, Ade Fatma. 2012. *Metode Penelitian Akuntansi dan Format Penulisan Tesis*, USU Press, Medan.

Magu.2016. "Influence Of Internal Control System On Financial Performance Of Kenya Farmers Association Limited", International Journal Of Economics, Commerce and Management, Vol.IV.

Muraleetharan. 2010. "Internal Control and Impact of Financial Performance of The Organization"

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/9/2009 Tentang "Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya".

, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang "Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya".

Tresnawati 2012. "Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung", Prosiding Seminar Nasional, ISBN: 978-602-17

Setyo Mahanani 2014. "Analisis Pengaruh APIP dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, SPIP sebagai variabel Moderating", Universitas Diponegoro, Semarang.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

**Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)**

**url:** <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 5 No 2 2024 hal 178-187

Sumarjo, H. 2010. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Suyono 2010. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia", Universitas Sebelas Maret, Surakarta.9